ISSN 2685-6530 E-ISSN 2722-5577
*https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/mediasi*

# Analisis Keuangan Daerah dengan Pendekatan Value For Money pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang

**Rusmalia Putri Utami[1], Hendry Saladin[2], Panca Satria Putra[3]**
[1]*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, rusmaliaputriutami@gmail.com*
[2]*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, hendrysaladin62@gmail.com*
[3]*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, pancastriaputra1@gmail.com*

## *ABSTRACT*

*The aim of this research is to find out how regional financial performance is measured by the government using a value for money approach at the Palembang City Regional Financial Asset Management Agency (BPKAD) for the period 2016 to 2020. The form of this research is qualitative, and the data used is Primary data is in the form of a report on the implementation of the Palembang City APBD for the current year. This research analyzes regional finances using a value to money approach using calculations of economic ratios, efficiency and effectiveness. The results of the research, namely economic ratios, show that regional finances tend to fall into the quite economical category. The efficiency ratio shows that regional finances are in a less efficient position. And the level of effectiveness tends to be in the quite effective category.*

***Keywords:*** *Value For Money, Economic Ratio, Efficiency Ratio, and Effectiveness Ratio.*

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan daerah diukur oleh pemerintah dengan pendekatan *value for money* pada Badan Pengelola Aset Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Palembang periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Adapun bentuk penelitian ini adalah kualitatif, dan data yang digunakan adalah data primer berupa laporan pelaksanaan APBD Kota Palembang tahun berjalan. Penelitian ini menganalisis keuangan daerah dengan pendekatan *value to money* dengan menggunakan perhitungan rasio ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. Hasil penelitian yaitu rasio ekonomis menunjukkan bahwa keuangan daerah cenderung masuk dalam kategori cukup ekonomis. Rasio efisiensi menunjukkan bahwa keuangan daerah berada pada posisi kurang efisiens. Dan pada tingkat efektivitasnya cenderung berada pada kategori cukup efektif.

**Kata kunci:** *Value For Money, Rasio Ekonomis, Rasio Efisiensi, dan Rasio Efektivitas*.

## A. PENDAHULUAN

Pengukuran kinerja merupakan elemen penting dalam organisasi, termasuk sektor publik. Hal ini penting dalam menilai tanggung jawab organisasi untuk menyediakan layanan publik yang lebih baik dan lebih tepat sasaran. Pengukuran kinerja di sektor publik berkontribusi dalam mencapai tiga tujuan. Salah satu cara untuk mengukur kinerja lembaga publik adalah dengan menggunakan pendekatan value for money. Pendekatan ini merupakan sebuah konsep yang mengatur organisasi sektor publik berdasarkan tiga faktor utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2018).

Pengadaan dan alokasi sumber daya yang ekonomis dan efisien dalam arti meminimalkan konsumsi sumber daya, memaksimalkan hasil, dan menerapkan visi secara efektif. Cara yang hemat biaya untuk mengevaluasi pekerjaan dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menerapkan mekanisme pengelolaan kekuasaan berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan yang tepat.

*is licensed under a* **Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License**.

ISSN 1693 - 4091
E-ISSN 2622 - 1845

Masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang baik, keseimbangan antara kekuasaan yang mereka miliki dan akuntabilitas yang mereka miliki terhadap masyarakat yang mereka layani. Birokrat harus lebih efisien dalam menjalankan kewenangannya, membimbing dan melindungi warga negaranya, serta dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka penerapan kewenangan yang lebih tinggi untuk melibatkan masyarakat dan memberikan pelayanan yang baik kepada warga dapat dilaksanakan secara obyektif dan efektif.

Ruang lingkup kewenangan daerah mencerminkan kemampuan daerah tersebut dalam melaksanakan misinya. Semakin tinggi tolak ukur efektif yang dicapai maka semakin efektif pula pengklasifikasian kapasitas daerah, begitu pula sebaliknya. Efektivitas mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan mandat daerahnya dibandingkan dengan tujuan yang dilaksanakan. Pendapatan daerah sendiri mengacu pada seluruh pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber perekonomian di daerah masing-masing. Pendapatan daerah mempunyai empat komponen. yakni, pendapatan pajak daerah sebesar 4, pendapatan retribusi daerah, pendapatan pengelolaan aset daerah tersendiri, dan pendapatan daerah lainnya yang sah.

Kemandirian fiskal daerah berarti bahwa pemerintah daerah membiayai seluruh kegiatan kota berdasarkan tingkat pendapatan daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah dari sumber lain (baik dukungan dari pemerintah pusat dan negara serta pembiayaan eksternal). Derajat kemandirian menunjukkan bahwa semakin tercapai maka ketergantungan terhadap dukungan pihak lain di daerah semakin berkurang, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pemerintah mengukur kinerja keuangan daerah dengan menggunakan pendekatan Value for money dalam pembiayaan dan alokasi BPKAD Kota Palembang.

## B. KAJIAN TEORI

### Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi pada devisi publik didefinisikan sebagai suatu entitas yang aktivitas kerja financialnya melibatkan produksi barang serta jasa publik yang berguna untuk memenuhi kebutuhan serta hak publik. Akuntansi sektor publik yakni suatu sistem yang dipergunakan oleh lembaga publik sebagai sarana transparansi / akuntabilitas pada publik (Handayani, 2019).

Lembaga sektor publik memiliki kesamaan dengan lembaga sektor privat sebabmemakai sumber daya yang samaserta dalam proses pengendalian yang hampir mirip. Namun visi yang dipergunakan lembaga sektor publik berbeda dengan lembaga sektor privat. Visi dari sektor privat yakni guna mencari keuntungan sesertagkan lembaga sektor publik memiliki visi bukan mencari keuntungan melainkan guna melayani masyarakat.

### Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik erat kaitannya dengan penerapan dan perlakuan akuntansi sektor publik. Secara kelembagaan, ruang publik meliputi lembaga nonlaba pemerintah serta lembaga nonlaba nonpemerintah.

Sistem akuntansi pada entitas pemerintah (pemerintah pusat, kementerian negara/lembaga, otoritas daerah) harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta peraturan pemerintah, dan departemen yang bergerak di sektor

ISSN 1693 - 4091
E-ISSN 2622 - 1845

korporasi (BUMN/BUMD) harus mengikuti standar akuntansi. (SAK) Diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Lembaga publik non pemerintah saat ini menganut Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

**Sifat dan Karakteristik Sektor Publik**

Sifat dan karakteristik lembaga devisi publik, terutama visinya, sifat serta sumber pendanaannya. Organisasi nirlaba adalah organisasi nirlaba. h.Mereka tidak mencari keuntungan. Sifat lembaga devisi publik yakni lembaga nonlaba, artiny tidak mengejar keuntungan. Visinya yakni guna member layanan pada masyarakat, serta memberi/ meningkatkan kesejahteraannya. Pemberi dana tak dana tidak ingin mengklaim keuntungan, kepentingan, atau kepemilikan organisasi.

Akuntansi sektor public mempunyai beberapa karakteristik yaitu :

1) Relevan
   Pelaporan financial pada akuntansi devisi publik seharusnya bersifat relevan. Relevan adalah berupa kapasitas informasi dalam pelaporan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan serta menilai peristiwa masa lalu dan masa depan.
2) Handal
   Dengan kata lain pelaporan keuangan akuntansi devisi publik memiliki informasi berharga yang bisa dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dengan pelaporanfinancial sebelumnya.
3) Mudah dipahami
   Pelaporan keuangan akuntansi devisi publik mempunyai karakteristik informasi yang bisa dengan mudah diserap oleh semua kalangan baik di dalam maupun di luar perusahaan.

**Akuntansi Keuangan Daerah**

Akuntansi keuangan daerah yakni akuntansi yang dipergunakan oleh otoritasan daerah, guna melaksanakan manajemen serta pengelola keuangan daerah. Otoritas daerah diberi wewenang guna mengatur serta mengurus sendiri urusan otoritasan menurut asas otonomi serta tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan penuduk melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan partisipasi. Selain itu, daerah juga diharapkan dapat meningkatkan daya saingnya melalui otonomi luas dengan menghormati prinsip demokrasi, kesetaraan, keadilan, keistimewaan, dan partikularitas, serta potensi dan keberagaman daerah dalam negara kesatuan republik yang memperhatikan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Ruang lingkup pembiayaan masyarakat meliputi APBD (Anggaran Daerah), Inventarisasi Aset Masyarakat, dan BUMD (Badan Usaha Milik Masyarakat). Status APBD dan kepemilikan aset daerah juga dikuasai langsung oleh daerah. Keuangan daerah dikelola oleh administrasi keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya atau aset dalam suatu daerah untuk mencapai tujuan daerah yang diinginkan. Administrasi keuangan daerah terdiri atas administrasi umum dan administrasi khusus.

**Perencanan dan Penganggaran**

Pengaturan perencanaan harus dilakukan selama proses penyusunan APBD untuk memastikan bahwa konteks keputusan dalam arah kebijakan umum, penetapan prioritas, dan keputusan alokasi dan distribusi sumber daya dirancang

ISSN 1693 - 4091
E-ISSN 2622 - 1845

sejelas mungkin dengan adanya keterlibatan warga. Dokumen persiapan pendanaan yang diserahkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disusun dalam Rencana Kerja dan Format Pendanaan (RKA). SKPD perlu menyajikan informasi yang benar-benar jelas mengenai visi, tujuan dan hubungan antara besaran pendanaan serta manfaat dan hasil yang dicapai masyarakat.

**APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)**

APBD dapat diartikan sebagai rencana pengelolaan keuangan **otoritas** daerah. Rencana ini di satu sisi menggambarkan perkiraan pengeluaran tertinggi untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah pada tahun anggaran tertentu, dan di sisi lain, perkiraan pendapatan dan proyek daerah. Sumber pendapatan untuk menutupi biaya permasalahan.

Pendanaan daerah mencerminkan keputusan yang tepat dan sosial dari penduduk di wilayah tersebut untuk memenuhi peran yang telah mereka tetapkan untuk keputusan tersebut. Pemerintah daerah harus, pertama, melaksanakan tugas mengumpulkan sumber daya yang memadai dengan baik dan, kedua, mengalokasikan dan menggunakan sumber daya tersebut dengan cepat, efisien dan efektif. Fungsi pertama mengacu pada sisi penerimaan (pendapatan) APBD, dan fungsi kedua mengacu pada sisi pengeluaran (pembelian Pemerintah daerah memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk melaksanakan tugasnya. Untuk pendanaan ini, pemerintah daerah mempunyai beberapa sumber pendapatan daerah yang tercantum dalam pendanaan. Dana yang dihasilkan akan mencerminkan dan memperlihatkan peningkatan kebijakan belanja pemerintah baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pihak berwenang bertanggung jawab memungut pajak dan biaya lainnya untuk tujuan seperti promosi ekonomi. Ada hubungan erat antara fasilitas pemakaian dana dan penarikannya. Ada pola pengeluaran pemerintah yang dapat dipertimbangkan ketika menentukan pola distribusi pendapatan.

**Pendapatan Belanja dan Pembiayaan**

Sumber pendapatan lokal meliputi:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
   Penghasilan yang dipungut atas dasar peraturan daerah berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Penghasilan Kekeaslianan Daerah bervisi guna memberi kewenangan pada otoritas daerah guna mendanai pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi.
   Adapun yang termasuk kedalam pendapatan asli daerah yakni:
   a) Pendapatan pajak daerah, yakni pembayaran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi /badan pada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang bisa dipaksakan atas dasar peraturan perundangan yang berlaku, yang dipergunakan guna membiayai pelaksanaan otoritas daerah serta pembangunan daerah
   b) Hasil retribusi daerah, yaitu pajak daerah sebagai imbalan atas jasa/ pemberian izin tertentu yang diberikan oleh otoritas daerah, terutama untuk kepentingan orang perseorangan/organisasi.
   c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil pengelolaan kekayaan daerah perseorangan yang dikelompokkan berdasarkan sumber pendapatan. Termasuk: Ketentuan mengenai hasil pengelolaan aset yang dipisahkan secara regional didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

ISSN 1693 - 4091
E-ISSN 2622 - 1845

d) PAD lain menurut undang-undang yang ditambahkan pada anggaran pendapatan daerah dan tidak termasuk dalam sifat pajak atau pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah tersendiri. Pendapatan ini juga mencakup pendapatan daerah dari otoritas daerah lainnya. Diantaranya adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak terpisahkan, jasa cek, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah dengan mata uang asing, serta biaya-biaya, potongan harga, dan lain-lain yang timbul dari penjualan tersebut.

2) Dana Perimbangan.
Artinya dana dari APBN dialokasikan ke daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah terkait pelaksanaan desentralisasi. Dana Kompensasi memiliki visi untuk mengurangi kesenjangan anggaran antar kota.

3) Pendapatan daerah lainnya yang sah.
Dana Kompensasi, termasuk pendapatan daerah lainnya yang sah, yaitu seluruh pendapatan daerah selain PAD, termasuk hibah, dana darurat, dan pendapatan lain yang berlaku.

**Kinerja Keuangan Daerah**

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang telah direncanakan baik oleh individu maupun organisasi dalam jangka waktu tertentu sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya, sebagai wujud pencapaian tujuan yang efektif (Djenni, 2021). Pengukuran kinerja mengacu pada pengukuran kinerja terhadap tujuan dan sasaran tertentu, termasuk informasi tentang efisiensi, konsumsi sumber daya dalam produksi barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan tujuan, dan efektivitas metode untuk mencapainya. Ini adalah metode mengevaluasi kemajuan tujuan pekerjaan seseorang (Solihin, 2019). Solihin, 2019). Jika pelayanan berjalan sesuai rencana, maka pelayanan dilaksanakan dengan baik. Apabila kinerja melebihi rencana maka dapat dikatakan kinerja sangat baik. Kinerja buruk terjadi ketika kinerja tidak memenuhi atau tidak mencapai rencana. Kinerja keuangan merupakan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator keuangan.

Dari definisi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah proses mengevaluasi keberhasilan sektor publik dalam mengimplementasikan visi tertentu. Visi evaluasi pekerjaan adalah untuk mengomunikasikan strategi dengan lebih baik, mengevaluasi operasi keuangan dan non-keuangan secara setara, melacak kemajuan dalam penerapan strategi, dan memahami, memotivasi, dan menyelaraskan kepentingan yang ingin dicapai oleh manajer tingkat menengah dan junior. Hal ini juga digunakan sebagai alat metodologis individu untuk mencapai kepuasan dan kompetensi kolektif berdasarkan pemikiran logis (Permana & Riharjo, 2017).

***Value For Money***

yaitu, merupakan suatu konsep guna mengukur program, kegiatan, dan aktivitas organisasi yang efisien, tepat, dan efektif. Para ekonom berpendapat bahwa lembaga publik efisien dan efektif karena meminimalkan penggunaan sumber daya input dengan menghindari pengeluaran yang tidak produktif dan boros, serta mencapai output maksimal dengan input tertentu. Hal ini mengacu pada metode yang efektif dalam mencapai hasil program berdasarkan visi (Wuwungan dkk., 2019).

Indikator penilaiankerja pada prinsip value for money terbagi jadi tiga yakni:

ISSN 1693 - 4091
E-ISSN 2622 - 1845

1) Ekonomis
   Mengacu pada pengkonversian *input* primer berupa sumber daya financial (uang/kas) jadimasukan sekunder berupa tenaga kerja, bahan, infastruktur, serta barang modal yang dikonsumsi gunaaktivitas operasi lembaga.Konsep ekonom sangat terkait dengan konsep biaya guna memperoleh unit masukan.Ekonom memiliki pengertian bahwasanya sumber daya masukan hendaknya diperoleh dengan harga lebih rendah (*spending less*),yakni harga yang mendekati harga pasar.Secara matematis, ekonomyakni perbandingan antara masukan dengan nilai rupiah guna memperoleh masukanitu. (Basri, 2018)
2) Efisiensi
   Jika ekonomis hanya berbicara mengenai *input*, yakni bagaimana memperoleh masukan dengan biaya / harga yang lebih rendah, maka efisien bebicara mengeni masukansertakeluaran.Efisien terkait dengn hubungan antara keluaran berupa barang /layanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang dipergunakanguna menghasilkan keluaranitu.Secara sistematis, efisienyakni perbandingan antara keluaran dengan masukan.Suatu lembaga, program, /aktivitasdisebutkan efisien jika mampu menghasilkan keluaran tertentu dengan masukan serendah-rendahnya, / dengan masukan tertentu mampu menghasilkan keluaransejumlah-besamya (*spending well*).
3) Efektifvitas
   Mengacu pada hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.Efektifyakni hubungan antara keluaranpada pencapaian visi.Semakin besar kontribusi keluaranpada pencapaian visi, maka semakin efektif lembaga, program /aktivitas.Jika ekonomis berfokus pada masukansertaefisien pada keluaran/ proses, maka efektif berfokus pada *outcome* (hasil).Suatu lembaga, program, /aktivitas dinilai efektif jika *keluaran* yangdihasilkan bisa memenuhi visi yang diharapkan, /disebutkan *spending wisely*.

## KERANGKA BERFIKIR

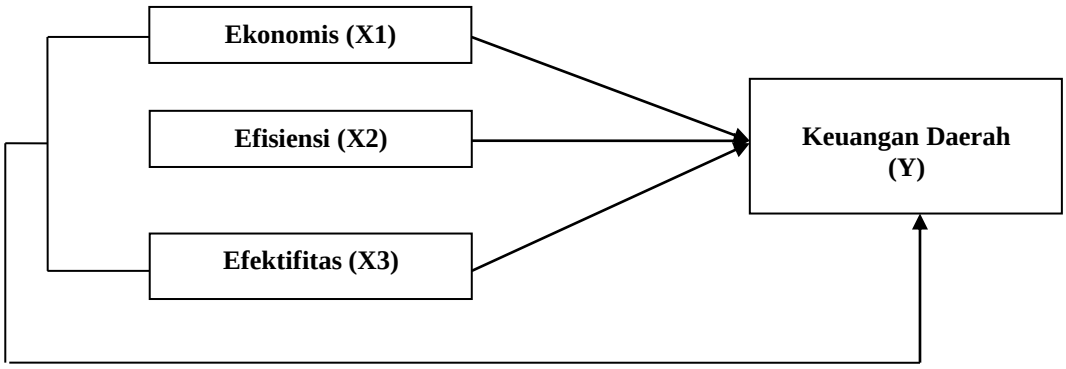


## C. METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini yaitu kinerja keuangan daerah dengan pedekatan Value For Money. Penelitian ini dilaakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang Jalan Sekanak No. 46, 22 Ilir, Kec. Bukit Kecil.

ISSN 1693 - 4091
E-ISSN 2622 - 1845

Penelitian ini peneliti menggunkan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019:16), metode kuantitatif disebut metode tradisional karena sudah lama digunakan sehingga secara tradisional menjadi metode penelitiaan. Metode ini disebut metode pasti positif karena didasarkan padaa filosofi positivisme. Cara ini merupakan metode ilmiah/scientific karena sesuai dengan kaidah keilmuan yaitu kontrik/empiris, obyektif, terukur, wajar dan sistematis. Metode ini jugaa disebut metode discovery, karena dapat digunkakan untuk menemukan dan mengembangkan berbagai ilmu dan teknologi baru. Karena terdapat data penelitian dalam bentuk angka- angka dan menggunakan statistik, maka metode ini disebut metode kuantitatif.

Pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas, dan Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Definisi Operasional Penelitian**

| Variabel | Definisi | Indikator |
|---|---|---|
| Ekonomiis | Ekonom, yakni pemerolehan masukan dengan kualitas tertentu dengan harga yang terendah. Ekonomyakni perbandingan masukan dengan masukan valueyang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonom terkait dengan sejauh mana lembagadevisi publik bisa meminimalisir masukan resources yang dipergunakan yakni dengan menghindari pengeluaran yang boros sertatak efektif. (Mardiasmo, 2002) | – Realisasi Pengeluaran<br>– Anggaran Pengeluaran |
| Efisiensi | Efisien, yakni pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu /pakaian masukan yang terendah guna menggapai keluaran tertentu. Efisien yakni perbandingan keluaran/masukan yang dikaitkan dengan standar kerja/tujuan pencapaian yang telah diberlakukan. (Mardiasmo, 2002) | – Realisasi Pengeluaran<br>– Realisasi Pendapatan |
| Efektivitas | Efektif, yakni tingkat pencapaian hasil program dengan tujuan pencapaian yang telah diberlakukan secara sederhana, efektif yakni perbandingan | – Realisaasi Pendapatan<br>– Anggaran Pendapatan |
| Keuangan Daerah | FinancialDaerahyakni semua hak serta kewajiban Daerah dalam rangka pelaksanaanOtoritasan Daerah yang bisa dinilai dengan uang serta segala bentuk harta yang bisa dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak serta kewajiban Daerahitu. (PP No. 12 Periode 2019) | – Total Anggaran<br>– Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |

Menurut sugiono (2019:126), populasi yakni daerah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek dengan kualitas serta ciri tertentu, serta peneliti telah menentukan ciri- ciri itu guna kemudian mempelajari serta menarik kesimpulan. Dalam riset ini, populasi yang dipergunakan oleh penulis yakni data anggaran dan realisasi pendapatan dan data anggaran dan realisasi belanja daerah Kota Palembang.

Menurut sugiono (2019:127), sampel yakni bagian dari ukuran serta karakteristik populasi. Jika populasinya besar serta peneliti tidak bisa mempelajari semua yang ada dalam populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga, serta waktu, peneliti bisa memakai sampel yang diperoleh dari populasi itu, maka kesimpulan itu berlaku untuk populasi tersebut. Sampel yang digunkakan dalam riset kali ini yakni informasi data anggaran dan realisasi pendapatan dan data anggaran dan realisasi belanja daerah Kota Palembang Tahun 2016-2020.

ISSN 1693 - 4091
E-ISSN 2622 - 1845

Sumber informasi yang dipergunakan dalam riset ini yakni data primer, yakni laporan realisasi anggaran Kota Palembang tahun 2016-2020 yang diperoleh dari Objek Riset yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Daerah Palembang. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya agar hasilnya mudah dipahami dan dikomunikasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2016). Analisis data penelitian kualitatif mengharuskan peneliti untuk mengeksplorasi, memahami, serta mengembangkan dan mengevaluasi hubungan dan konsep. Dalam penelitian ini, peneliti menyelidiki tiga indikator yang digunakan dalam menghitung kinerja keuangan daerah dengan menggunakan teknik Ivalue for money.

**Rasio ekonomis**

Rasio ini hanya memperhitungkan sumber daya yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan ekonomis apabila biaya-biaya yang tidak perlu dapat dikurangi atau dihindari. Ketika biaya meningkat, keuntungan harus meningkat lebih jauh. Pengukuran dengan indikator ekonomi memerlukan data berupa anggaran belanja dan belanja aktual.

Rumus untuk rasio ekonomi adalah:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{Realisasi\ Belanja}{Anggaran\ Belanja}\ x\ 100\%$$

Berikut ini adalah kriteria ekonomis dalam penilaian kinerja keuangan (Indrayani, 2018):

| Persentase Rasio | Kriteria |
|---|---|
| Lebih dari 100% | Tidak Ekonomis |
| 90% - 100% | Kurang Ekonomis |
| 80% - 90% | Cukup Ekonomis |
| 60% - 80 | Ekonomis |
| Kurang dari 60% | Sangat Ekonomis |

**Rasio efisiensi**

Rasio ini berarti tercapainya *output* maksimum terhadap *input*. Efisiensi erat kaitannya dengan konsep produktivitas. Efisiensi diukur dengan membandingkan sumber daya yang dihasilkan dan sumber daya yang digunakan (N.P.Solong, dkk, 2022). Efisiensi penggunaan sumber daya dalam arti meminimalkan konsumsi sumber daya dan memaksimalkan hasil. Efisiensi dapat mewakili besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan pendapatan yang sebenarnya diterima.

Rumus efisiensinya adalah:

$$\textbf{Rasio Efisiensi} = \frac{Realisasi\ Belanja}{Realisasi\ Pendapatan}\ x\ 100\%$$

Berikut ini adalah kriteria efisiensi dalam penilaian kinerja keuangan (Indrayani, 2018):

ISSN 1693 - 4091
E-ISSN 2622 - 1845

| Persentase Rasio | Kriteria |
|---|---|
| Lebih dari 100% | Tidak Efisien |
| 90% - 100% | Kurang Efisien |
| 80% - 90% | Cukup Efisien |
| 60% - 80 | Efisien |
| Kurang dari 60% | Sangat Efisien |

**Rasio Efektivitas**

Rasio ini adalah adalah sejauh mana hasil program tercapai terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas pada hakikatnya mengacu pada pencapaian tujuan atau sasaran politik. Efektivitas mengacu pada hubungan antara hasil dan tujuan yang dimaksudkan dengan mengukur sejauh mana kebijakan, prosedur, dan tingkat hasil memenuhi tujuan yang ditetapkan (P.A. Erawan, dkk, 2018). Rasio efektivitas mewakili kemampuan pemerintah negara bagian dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Rumus rasio efektivitas adalah:

$$\textbf{Rasio Efektivitas} = \frac{Realisasi\ Pendapatan}{Anggaran\ Pendapatan}\ x\ 100\%$$

Berikut ini adalah kriteria efektivitas dalam penilaian kinerja keuangan (Indrayani, 2018):

| Persentase Rasio | Kriteria |
|---|---|
| Lebih dari 100% | Sangat Efektif |
| 90% - 100% | Efektif |
| 80% - 90% | Cukup Efektif |
| 60% - 80 | Kurang Efektif |
| Kurang dari 60% | Tidak efektif |

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Rasio

### Rasio Ekonomis

Rasio ini mengacu pada perolehan *input* dengan kualitas tertentu dengan harga terendah. Skala ini hanya mempertimbangkan sumber daya yang dipergunakan. Suatu aktivitas disebutkan ekonomis apabila biaya-biaya yang tidak perlu dapat dikurangi atau dihindari. Ketika biaya meningkat, keuntungan seharusnya meningkat lebih banyak lagi. Penilaian dengan indikator ekonomis memerlukan informasi berupa anggaran belanja dan belanja aktual.

**Rasio Ekonomis BPKAD Kota Palembang**

| Tahun | Realisasi Belanja | Anggaran Belanja | Rasio Ekonomis | Kriteria Rasio |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2.914.627.987.631,23 | 3.368.364.428.760,18 | 86,53 % | Cukup Ekonomis |
| 2017 | 3.141.848.658.597,72 | 3.383.208.534.684,50 | 92,87 % | Kurang Ekonomis |
| 2018 | 3.347.054.548.811,56 | 3.992.371.467.222,82 | 83,84 % | Cukup Ekonomis |
| 2019 | 3.968.206.721.208,36 | 4.791.602.844.436,65 | 82,82 % | Cukup Ekonomis |
| 2020 | 3.688.142..153.604,14 | 4.211.412.502.333,76 | 87,57 % | Cukup Ekonomis |

***Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Yang Telah Diolah***

ISSN 1693 - 4091
E-ISSN 2622 - 1845

**Rasio Efisiensi**

Proses aktivitas operasional bisa dikatakan efisien jika suatu produk / hasil kerja tertentu bisa dicapai dengan pemakaian sumber daya serta dana seminimum mungkin. Efisien erat kaitannya dengan konsep produktivitas..Efisien diukur dengan membandingkan sumber daya yang diproduksi sertav dipergunakan. Efisiensi sumber daya berarti konsumsi sumber daya diminimalkan dan hasil dimaksimalkan. Efisiensi mengacu pada perbandingan pengeluaran aktual dengan pendapatan aktual.

**Rasio Efisiensi BPKAD Kota Palembang**

| Tahun | Realisasi Belanja | Realisasi Pendapatan | Rasio Efisiensi | Kriteria Rasio |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2.914.627.987.631,23 | 3.122.903.127.195,01 | 93,33 % | Kurang Efisien |
| 2017 | 3.141.848.658.597,72 | 3.417.593.733.021,39 | 91,93 % | Kurang Efisien |
| 2018 | 3.347.054.548.811,56 | 3.485.882.634.349,88 | 96,02 % | Kurang Efisien |
| 2019 | 3.968.206.721.208,36 | 3.987.546.941.588,54 | 99,51 % | Kurang Efisien |
| 2020 | 3.688.142..153.604,14 | 3.695.470.898.063,30 | 99,80 % | Kurang Efisien |

***Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Yang Telah Diolah***

**Rasio Efektivitas**

Rasio efektivitas mewakili sejauh mana hasil program dicapai relatif terhadap sasaran kinerja yang dilaksanakan. Efektif pada hakikatnya mengacu pada pencapaian visi/tujuan kebijakan. Efektif mengacu pada hubungan antara hasil dan tujuan yang diharapkan dengan mengukur sejauh mana kebijakan, prosedur, dan tingkat hasil memenuhi visi yang diterapkan. Ukuran efektivitas mencerminkan kemampuan otoritas daerah dalam merealisasiankan penghasilan yang direncanakan dibandingkan dengan tujuan pencapaian yang diberlakukan.

**Rasio Efevtivitas BPKAD Kota Palembang**

| Tahun | Realisasi Belanja | Realisasi Pendapatan | Rasio Efisiensi | Kriteria Rasio |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3.122.903.127.195,01 | 3.466.134.113.873,28 | 90,09 % | Efektif |
| 2017 | 3.417.593.733.021,39 | 3.578.989.385.107,80 | 95,49 % | Efektif |
| 2018 | 3.485.882.634.349,88 | 3.952.034.936.055,46 | 88,20 % | Cukup Efektif |
| 2019 | 3.987.546.941.588,54 | 4.756.675.415.204,56 | 83,83 % | Cukup Efektif |
| 2020 | 3.695.470.898.063,30 | 4.164.188.852.721,50 | 88,74 % | Cukup Efektif |

**Pembahasan**

**Rasio Ekonomis**

Rasio ekonomis pada tahun 2016 sebesar 86,53% berada pada kisaran 80% hingga 90% dan masuk dalam kategori “cukup ekonomis”. Pada tahun 2017, rasio ekonomi sebesar 92,87% masuk dalam kategori kurang ekonomi. Rasio perekonomian pada tahun 2018 sebesar 83,84% termasuk dalam kategori cukup ekoomis. Rasio perekonomian pada tahun 2019 ditetapkan sebesar 82,82% yang termasuk dalam kategori “cukup ekonomis”. Rasio perekonomian pada tahun 2020 sebesar 87,57% termasuk dalam kategori “cukup ekonomis”.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Ali Sartono, 2018). Temuannya menyimpulkan bahwa pemerintah daerah masih belum menerapkan disiplin

ISSN 1693 - 4091
E-ISSN 2622 - 1845

anggaran pada awal dan akhir masa pelaksanaan program nasional. Banyak pemborosan penggunaan dana operasional program pemerintah. Biaya operasional meliputi biaya pegawai, biaya barang dan jasa, biaya bunga, biaya hibah, biaya hibah, biaya bantuan sosial, dan biaya bantuan keuangan. Jika ternyata pengeluaran operasional berada di bawah anggaran yang ditentukan dapat menunjukkan bahwa tidak terjadi pemborosan.

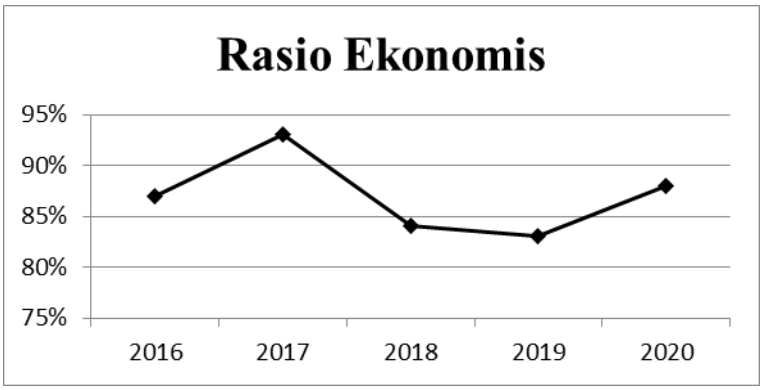


**Grafik Perkembangan Rasio Ekonomis Pemerintah Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2016 – 2020 (Sumber : Data Primer, Diolah)**

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa, pada tahun anggaran 2016 dan 2017 perhitungan rasio ekonomis terdapat kenaikan yang sebesar 6,34%, akan tetapi juga terdapat penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2018 dan 2019 yaitu sebesar 9,03% dan 1,02%, kemudian terjadi kenaikan kembali pada tahun 2020 sebesar 4,75%. Dapat dilihat bahwa pemerintah masih belum displin dalam menerapkan kebijakan terhadap penggunaan anggaran.

**Rasio Efisiensi**

Tahun 2016 rasio efisiensi sebesar 93,33%, yang beraarti berada dalam kategori kurang efisien. 2017 efisiensi sebesar 91,93%, masuk dalam kategori kurang efisien. Tahun 2018 rasio efisiensi sebesar 96,02%, yang mana berarti berada daalam kategori kurang efisien. Untuk 2019 efisiensi yang didapatkan sebesar 99,51%, berada pada kategori kurang efisien. Di 2020 rasio efisiensi sebesar 99,80%, termasuk dalam kategori kurang efisien, bahkan hampir mencapai 100%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Debby Tamara Enre, 2020) dimana dilakukan perhitungan rasio efisiensi untuk mengetahui berapa besar belanja daerah yang dikeluarkan Kota Palembang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian pada (Debby Tamara Enre, 2020) dimana dilakukan perhitungan rasio efisiensi untuk mengetahui berapa besar belanja daerah yang dikeluarkan Kota Palembang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dapat dikatakan bahwa selama periode tahun 2016 hingga tahun 2020, Pemerintah Kota Palembang gagal melakukan efisiensi pengeluaran dan mendayagunakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah dicapai. Sekalipun otoritas daerah berhasil melaksanakan anggaran alokasi sesuai dengan target yang ditetapkan, keberhasilan tersebut akan berkurang jika biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan alokasi ternyata lebih tinggi daripada pendapatan anggaran aktual yang dihasilkan.

ISSN 1693 - 4091
E-ISSN 2622 - 1845

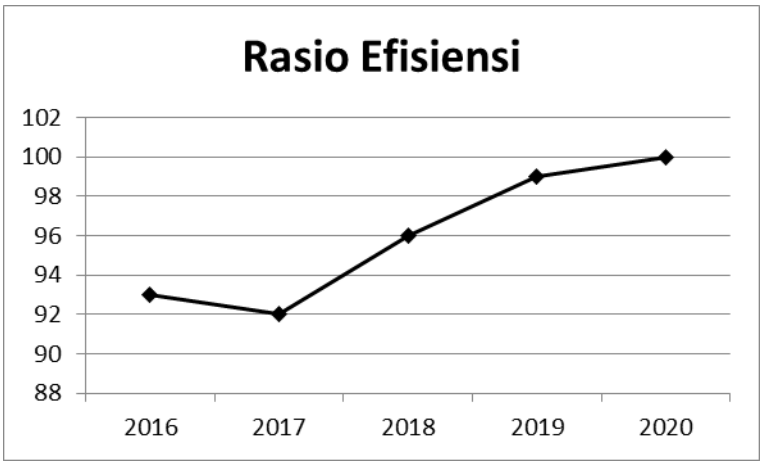


**Grafik Perkembangan Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2016 – 2020 (Sumber : Data Primer, Diolah)**

Atas dasar grafik di atas bisa dilihat bahwasanya terjadi ketakstablian dalam penilaian skala efisien bahkan cenderung mengalami kenaikan. Hanya terjadi penurunan pada periode 2017 sebanyak 1,4%, kemudian kembali mengalami kenaikan pada periode-periode berikutnya bahkan hampir menggapai 100% pada periode 2020. Pada periode 2018 mengalami kenaikan sejumlah 4,09%, periode 2019 sejumlah 3,49%, serta periode 2020 sejumlah 0,25%. Hal ini menunjukkan bahwasanya otoritas belum mampu memakai sumber daya yang diperlukan dengan mengefisienkan pengeluaran guna menggapai tujuan pencapaian yang dicapai. Jika otoritas daerah berhasil merealisasiankan anggaran alokasi berdasarkan dengan tujuan pencapaian yang diberlakukan, keberhasilan itu minim memiliki arti jika ternyata biaya yang dikeluarkan guna merealisasiankan pelaksanaan alokasi itu lebih besar daripada realisasian pendapatan anggara yang diterima.

**Rasio efektivitas**

Tahun 2016 rasio efektivitas sebesar 90,09%, yang berarti efektif. Tahun 2017 rasio efektivitas sebesar 95,49%, masuk dalam kategori efektif. Tahun 2018 rasio efektivitas sebesar 88,20%, yang mana berarti berada dalam kategori cukup efektif. Untuk tahun 2019 rasio efektivitas yang didapatkan sebesar 83,83%, berada pada kategori cukup efektif. Tahun 2020 rasio efektivitas sebesar 88,74%, termasuk dalam kategori cukup efektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Ali Sartono, 2018) (Debby Tamara Enre, 2020), yang menyatakan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kota Palembang tidak hanya dinilai dari segi efektivitasnya saja, tetapi juga dari segi kinerjanya. Suatu pemerintah daerah dikatakan berhasil apabila mampu mencapai anggaran pendapatan yang melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dan biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan anggaran peruntukannya lebih kecil dari target belanja yang dicapai. Dapat dikatakan perhitungan kinerja menggunakan rasio efektivitas periode 2016-2020 tergolong sangat efektif. Hal ini menunjukkan realisasi anggaran mendekati target anggaran yang ditetapkan dan Pemerintah Kota Palembang berhasil melaksanakan rencana kerja mencapai tujuan namun banyak hasil yang dihasilkan terhadap pencapaian belum sesuai tujuan.

ISSN 1693 - 4091
E-ISSN 2622 - 1845

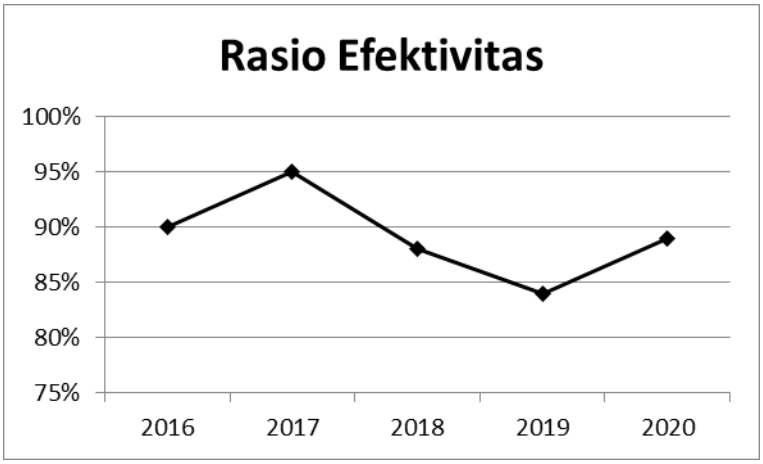


**Grafik Perkembangan Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2016 – 2020 (Sumber : Data Primer, Diolah)**

Dari grafik di atas terlihat bahwasanya rasio efektivitas mengalami kenaikan serta penurunan setiap periodenya. Pada periode 2016 serta 2017 terjadi kenaikan sejumlah 5,4%, hal ini membuat skala efektif dua periode itu berada pada golongan "efektif", yang berarti otoritas cukup efektif dalam merealisasikan anggaran pendapatannya lebih tinggi dari anggaran pendapatannya yang diberlakukan. Namun juga terjadi penurunan pada periode 2018 serta 2019, sejumlah masing-masing 7,29% serta 4,37%, tetapi masih dalam golongan cukup efektif. Kemudian mengalami kenaaikaan kembali pada periode 2020 sebanyak 4,91%. pemerintah daerah disebutkan berhasil jika bisa mencapai anggaran pendapatan yang melebihi target pendapatan yang diberlakukan, serta biaya yang dikeluarkan guna merealisasiankan pendanaan pembelian lebih kecil dari target belanja yang dicapai. Otoritas bias melaksanakan program-program yang dibuat guna meningkatkan kerja serta mencapai visi yang diinginkan. Program yang dilaksanakan antara lain upaya peningkatan pajak daerah. Pajak daerah meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak taman, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, pajak bangunan, dan pajak air tanah.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan Kota Palembang yang dilakukan pada penelitian ini berdasarkan konsep *value for money,* maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengukuran rasio ekonomis adalah sebagai berikut. Perbandingan realisasi belanja dengan anggaran belanja periode 2016-2020 menunjukkan bahwa pemerintah masih kurang disiplin dalam menerapkan pedoman penggunaan anggaran daerah. rasio ekonomi menunjukkan tahun 2017 kurang ekonomis, namun tahun-tahun lainnya lebih ekonomis.
2. Rasio Efisiensi cenderung menurun pada periode 2016-2020 bahkan mencapai hampir 100% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwasanya otoritas belum mampu memakai sumber daya yang diperlukan dengan mengefisienkan pengeluaran guna menggapai tujuan pencapaian yang ingin dicapai.
3. Rasio efektivitas pada periode 2016-2020, mengalami kenaikan serta penurunan setiap periodenya, namun masih berada pada golongan cukup efektif. Ini

ISSN 1693 - 4091
E-ISSN 2622 - 1845

menunjukkan bahwasanya pemerintah Daerah Palembang telah cukup berhasil dalam menjalankan program kerjanya, sebab pelaksanaan anggaran telah mendekati target anggaran yang telah diberlakukan.

**Saran**

Atas dasar kesimpulan dari hasil riset di atas, maka berikut yakni beberapa saran yang dapan diberikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang sebagai berikut :

1. Disarankan bagi pemerintah daerah yang dalam hal ini BPKAD Daerah Palembang, guna lebih displin dalam menerapkan kebijakan penggunaan anggaran agar tak terjadi pemborosan terutama pada aktivitas belanja operasional, hal ini dilaksanakan guna menekan realisasian belanja daerah agar lebih kecil dari anggaran yang telah diberlakukan.
2. Disarankan bagi pemerintah daerah yang dalam hal ini BPKAD Daerah Palembang, guna mampu mengolah sumber daya yang diperlukan dengan lebih efisien agar bisa merealisasiankan anggaran belanja berdasarkan dengan tujuan pencapaian yang diberlakukan.
3. Disarankan bagi pemerintah daerah yang dalam hal ini BPKAD Daerah Palembang, untuk bisa melaksanakan program-program yang dibuat guna meningkatkan efektivitas kinerja serta menggapai visi yang diinginkan.
4. Pemerintah daerah, dalam hal ini Badan Pengelola Aset Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Palembang, dan pemangku kepentingan diharapkan dapat lebih memberikan perhatian terhadap underutilization anggaran daerah, serta memberikan perhatian lebih terhadap overutilisasi anggaran daerah yang diharapkan. Apabila terjadi pemborosan dana melebihi tujuan yang telah ditetapkan, maka anggaran belanja dapat dibuat lebih efisien, sehingga penggunaan dana lebih akurat dan dana tidak digunakan secara berlebihan untuk pelaksanaan program kerja. Ada pula yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan, dan diharapkan efektivitasnya akan meningkat jika diperoleh *output* yang memadai.

## DAFTAR PUSTAKA

Enre, D. T. (2020). *Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan.* Medan.

Halim, A. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta: Salemba Empat.

Hery. (2016). *Analisis Laporan Keuangan.* Jakarta: PT Grasindo Anggota IKAPI.

Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Ketiga.* UPP STIM YKPN.

Mashun, M. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi Pertama.* Yogyakarta: BPFE UGM.

ISSN 1693 - 4091
E-ISSN 2622 - 1845

Oman Rusmana, D. S. (2017). *Akuntansi Pemerintahan Daerah.* Jakarta: Salemba Empat.

Sartono, A. (2018). *Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2012-2016 Berdasarkan Konsep Value For Money.* Yogyakarta.

Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual).* Yogyakarta: Unit Penerbit dan Pencetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN.

Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D.* Yogyakarta: Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Wiratna. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Wuwungan, e. a. (2019). Penerapan Metode Value For Money Sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Pada Organisasi Sektor Publik Di Dinas Kesehatan Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset* .